

NEGOSIASI OTORITAS KEAGAMAAN DI ERA AI: FENOMENOLOGI VERIFIKASI JAWABAN CHATGPT OLEH MAHASISWA PAI

Aidil Berkani¹, Yoga Jundirwan², Siti Aisyah Ummukultsum³, Rahman Afri Yuda⁴

^{1,2,3,4}Universitas Al-Kifayah Riau, Indonesia

Email: aidilberkani13@gmail.com

Abstrak

Penggunaan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan keagamaan menempatkan otoritas yang tidak memiliki sanad, wajah, dan pertanggungjawaban keilmuan di hadapan mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berposisi sebagai pembelajar sekaligus calon pendidik. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana pengalaman memverifikasi jawaban ChatGPT dapat dipahami sebagai proses negosiasi otoritas keagamaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka dan analisis fenomenologis konseptual, yang dilengkapi skenario ilustratif sebagai alat bantu analisis. Hasil analisis menunjukkan tiga momen verifikasi, yaitu keraguan akibat ketidaklengkapan jawaban, pencarian jangkar pada teks sumber, dan rujukan kepada figur keilmuan, serta empat tema esensial: kefasihan yang menuntut jejak, teks sebagai jangkar, tanggung jawab yang tidak dapat didelegasikan, dan ketegangan antara kemudahan dan beban verifikasi. Negosiasi otoritas bergerak pada tiga poros: AI sebagai sumber cepat, teks sebagai sumber normatif, dan figur keilmuan sebagai penjamin tanggung jawab. Semakin dekat pertanyaan dengan praktik ibadah pribadi, semakin besar bobot figur atau lembaga manusia. Artikel ini mengajukan gagasan bahwa AI berfungsi sebagai lapisan pra-otoritas, dan merekomendasikan penguatan literasi AI keagamaan dalam pembelajaran PAI tanpa mengabaikan peran sanad dan bimbingan guru.

Kata Kunci: Otoritas Keagamaan, Kecerdasan Buatan, ChatGPT, Fenomenologi, Pendidikan Agama Islam.

Abstract

The use of ChatGPT to answer religious questions places an authority without a chain of transmission (sanad), a face, or scholarly accountability before students of Islamic Religious Education (PAI), who are both learners and prospective educators. This article analyzes how the experience of verifying ChatGPT's answers can be understood as a negotiation of religious authority. It employs a qualitative approach using a literature-based design and conceptual phenomenological analysis, supplemented by illustrative scenarios as an analytical aid. The analysis identifies three moments of verification: doubt arising from incomplete answers, the search for anchors in primary texts, and referral to scholarly figures, together with four essential themes: fluency that demands traceability, texts as anchors, accountability that cannot be delegated, and the tension between convenience and the burden of verification. Authority is negotiated along three axes: AI as a fast source, texts as a normative source, and scholarly figures as guarantors of accountability. The closer a question is to personal religious practice, the greater the weight given to human figures or institutions. The article proposes that AI functions as a pre-authority layer and recommends strengthening religious AI literacy in PAI learning without diminishing the role of sanad and teacher guidance.

Keywords: Religious Authority, Artificial Intelligence, ChatGPT, Phenomenology, Islamic Religious Education.

A. PENDAHULUAN

Bertanya tentang agama kini tidak selalu berarti datang kepada guru. Bagi sebagian mahasiswa, pertanyaan tentang hukum menggabungkan salat, status jual beli daring, atau perbedaan pendapat mazhab lebih dulu diketik ke ChatGPT, baru kemudian dibawa, kalau memang dibawa, ke ustaz atau dosen. Jawaban yang muncul cepat, rapi, dan berbahasa santun. Justru di situlah persoalannya: kefasihan jawaban mudah dibaca sebagai kebenaran, padahal model bahasa tidak memiliki sanad keilmuan, tidak bertanggung jawab secara keagamaan, dan tidak dapat ditegur bila keliru.

Persoalan ini relevan bagi mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) karena posisi mereka berlapis. Mereka adalah pembelajar ilmu keislaman sekaligus calon guru yang kelak menjadi rujukan bagi peserta didik. Ketika mereka memakai kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) untuk urusan agama, yang dipertaruhkan bukan hanya akurasi informasi, tetapi juga cara mereka memahami siapa yang berhak berbicara atas nama agama. Cara seorang calon guru memperlakukan sumber hari ini akan membentuk cara ia mengajarkan peserta didik memperlakukan sumber esok hari.

Sejak ChatGPT dirilis pada akhir 2022, model bahasa besar dengan cepat memasuki ruang kelas dan ruang belajar mandiri. Kajian tentang AI generatif dalam pendidikan menyoroti peluangnya sekaligus risikonya, termasuk keluaran yang keliru namun meyakinkan dan kebutuhan akan pengawasan pendidik (Dwivedi et al., 2023). Pada bidang agama, risiko itu memiliki bobot tersendiri. Pertanyaan keagamaan bukan sekadar permintaan informasi. Jawabannya dapat menentukan sah tidaknya ibadah, halal haramnya transaksi, atau sikap seseorang terhadap perbedaan pendapat. Dalam tradisi Islam, menjawab pertanyaan hukum adalah tugas berat yang menuntut kualifikasi keilmuan dan kehati-hatian. Karena itu, ketika jawaban semacam itu datang dari sistem yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, pertanyaan tentang otoritas menjadi tak terhindarkan (Kasneci et al., 2023).

Literatur tentang otoritas keagamaan di ruang digital sudah cukup mapan. Campbell (2007) menunjukkan bahwa internet tidak serta-merta menghapus otoritas tradisional, tetapi memaksa komunitas beragama menegosiasikannya. Campbell (2020) kemudian menelaah para pelaku kreatif digital yang merumuskan ulang otoritas melalui praktik bermedia. Bunt (2018) menunjukkan bahwa lingkungan siber Islam menggeser cara otoritas dibentuk dan diakui. Di Indonesia, kajian tentang dakwah digital banyak menyoroti figur pendakwah dan media sosial (Hew, 2018). Namun, hampir semua kajian itu membahas otoritas yang berwajah manusia, yakni pendakwah, pencipta konten, atau komunitas daring yang dapat dikenali dan dinilai. Pada ChatGPT, otoritas tampil tanpa wajah, tanpa nama guru, dan tanpa silsilah keilmuan. Bagaimana pengguna menyikapi "suara tanpa wajah" ini masih jarang dikaji, terutama dari sisi pengalaman hidup pengguna itu sendiri dan terutama pada kelompok yang sedang dididik untuk menjadi pengajar agama (Lengauer, 2018).

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan: (1) bagaimana pengalaman mahasiswa PAI memverifikasi jawaban ChatGPT atas pertanyaan keagamaan dapat dipahami sebagai rangkaian momen yang bermakna; (2) bagaimana otoritas keagamaan dinegosiasikan antara AI, teks sumber, dan figur keilmuan dalam proses itu; dan (3) apa implikasinya bagi pembelajaran PAI. Tujuan penulisan adalah memetakan struktur pengalaman verifikasi, menawarkan model analitis negosiasi otoritas, dan merumuskan implikasi pedagogis yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam.

Kontribusi artikel ini bersifat ganda. Secara teoretis, artikel ini memperluas diskusi otoritas keagamaan digital dari otoritas berwajah manusia ke otoritas algoritmik yang tidak berwajah, dan mengajukan gagasan lapisan pra-otoritas sebagai cara membaca posisi AI. Secara praktis, artikel ini menawarkan protokol verifikasi dan rancangan pembelajaran literasi AI keagamaan bagi dosen dan pengelola program PAI. Artikel disusun dalam lima bagian: pendahuluan, kajian teoretis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Otoritas dan Legitimasi Keagamaan

Otoritas dapat dipahami sebagai kemampuan memperoleh kepatuhan atau kepercayaan karena dianggap sah. Weber (1978) membedakan tiga tipe murni legitimasi: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Ketiganya berguna sebagai kacamata awal, tetapi otoritas keagamaan dalam Islam memiliki ciri tambahan, yakni keterlacakan pengetahuan. Seorang pemberi jawaban keagamaan dinilai bukan hanya dari apa yang ia katakan, tetapi dari mana pengetahuannya berasal: guru siapa, kitab apa, dan dalam jaringan keilmuan mana ia berada. Zaman (2002) menggambarkan ulama sebagai penjaga tradisi yang terus beradaptasi terhadap perubahan, dengan klaim atas hak menafsirkan yang bertumpu pada pelatihan dan pengakuan komunitas. Azra (2004) menunjukkan peran jaringan ulama dalam menyalurkan pengetahuan keislaman ke Nusantara sehingga keterhubungan antarguru menjadi fondasi legitimasi.

Di Indonesia, mekanisme ini tampak jelas dalam tradisi pesantren. Dhofier (2011) menggambarkan kiai sebagai figur yang otoritasnya lahir dari penguasaan kitab, silsilah keguruan, dan keteladanan, sedangkan van Bruinessen (1995) menunjukkan peran kitab kuning sebagai kurikulum yang menautkan santri pada rantai transmisi tertentu. Dalam pola ini, belajar agama bukan hanya mengumpulkan informasi, tetapi memasuki relasi: ada guru yang mengoreksi, ada kitab yang dirujuk, ada komunitas yang menjadi saksi. Otoritas bersifat relasional dan dapat diminta pertanggungjawaban.

2. Mediatisasi dan Otoritas Keagamaan Digital

Hjarvard (2008) menjelaskan bahwa media bukan lagi sekadar saluran, melainkan lingkungan tempat agama beradaptasi dan berubah. Dalam kerangka ini, praktik beragama menyesuaikan diri dengan logika media, seperti kecepatan, keringkasan, dan kemudahan akses. Eickelman dan Anderson (2003) mencatat bahwa media baru di dunia Muslim memperluas ruang publik keagamaan sehingga otoritas tidak lagi eksklusif milik lembaga atau ulama formal. Campbell (2007) menambahkan bahwa otoritas di ruang digital bersifat dinegosiasikan: komunitas dan individu terus-menerus menimbang siapa yang pantas didengar, tanpa sepenuhnya meninggalkan struktur otoritas yang sudah ada. Bunt (2018) menegaskan hal serupa dengan menyoroti peran algoritma dan platform dalam membentuk apa yang tampak otoritatif, sedangkan Campbell dan Tsuria (2021) memetakan bagaimana agama digital telah berkembang menjadi bidang kajian yang menaruh perhatian pada praktik, identitas, dan otoritas.

Di Indonesia, Hew (2018) menunjukkan bagaimana kemasan visual dan strategi persuasi membentuk daya tarik seorang pendakwah di media sosial, dan Lengauer (2018) menelaah bagaimana media sosial menjadi sarana aktivisme keagamaan. Keduanya menunjukkan bahwa otoritas digital sering dibangun melalui kedekatan personal dan keterampilan bermedia, bukan semata kedalaman keilmuan. Meskipun demikian, subjek otoritas dalam kajian-kajian tersebut tetap manusia yang dapat dikenali, dikritik, dan dikonfirmasi rekam jejaknya.

3. Model Bahasa Besar dan Persoalan Epistemik

ChatGPT adalah model bahasa besar yang menghasilkan teks dengan memprediksi rangkaian kata yang paling mungkin berdasarkan pola data latih, bukan dengan memahami dalil (Bender et al., 2021). Pelatihan lanjutan dengan umpan balik manusia membuat model lebih mampu mengikuti instruksi dan menghasilkan jawaban yang selaras dengan preferensi pengguna (Ouyang et al., 2022). Dampaknya, jawaban terdengar luwes dan meyakinkan. Namun, jawaban yang enak dibaca tidak menjamin benar. Model dapat menghasilkan klaim, kutipan, atau rujukan yang tampak sah tetapi tidak berdasar, gejala yang dalam literatur

disebut halusinasi (Ji et al., 2023). Floridi dan Chiriatti (2020) mengingatkan bahwa kemampuan menghasilkan teks yang koheren tidak sama dengan kemampuan menalar atau bertanggung jawab atas isinya. Bommasani et al., (2021) menambahkan bahwa model dasar yang dipakai luas dapat menyebarkan kelemahan yang sama ke banyak penggunaan sekaligus, sehingga kekeliruan yang sama berpotensi dialami banyak pengguna.

Bagi pertanyaan keagamaan, ada tiga konsekuensi epistemik. Pertama, jawaban tidak disertai sanad atau rantai rujukan yang dapat dilacak. Kedua, tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban keagamaan atas isi jawaban. Ketiga, jawaban sering bersifat umum dan tidak peka terhadap konteks penanya, seperti mazhab yang dianut, kondisi tempat tinggal, atau keadaan khusus yang mempengaruhi hukum. Ketiganya menjelaskan mengapa jawaban ChatGPT atas pertanyaan agama memerlukan perlakuan yang berbeda dari jawaban atas pertanyaan faktual biasa.

4. Fenomenologi sebagai Kacamata Analisis

Fenomenologi berangkat dari upaya Husserl (1970) untuk kembali pada pengalaman sebagaimana dihayati dalam dunia kehidupan (*Lebenswelt*) dengan menunda anggapan-anggapan yang dianggap sudah jelas (*epoché*). Schütz (1967) membawa gagasan ini ke dunia sosial dengan menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari ditopang oleh cadangan pengetahuan yang diterima begitu saja, termasuk kepercayaan kepada sumber yang dianggap layak. Kepercayaan ini baru tampak ketika terganggu, misalnya ketika sebuah jawaban terasa janggal. Moustakas (1994) merumuskan prosedur fenomenologi transendental yang mencakup *epoché*, reduksi, variasi imajinatif, dan sintesis makna, sedangkan van Manen (2016) menekankan pertanyaan tentang seperti apa rasanya mengalami sesuatu. Dalam artikel ini, verifikasi dipandang sebagai momen ketika kepercayaan yang biasanya berjalan diam-diam menjadi disadari dan dipertimbangkan.

5. Tabayyun dan Etika Verifikasi

Verifikasi dalam konteks Islam tidak hanya soal ketepatan, tetapi juga soal etika. QS. Al-Hujurat ayat 6 memerintahkan orang beriman untuk memeriksa dengan teliti kabar yang dibawa oleh pihak yang tidak dapat dipastikan keandalannya. Prinsip tabayyun ini menjadi dasar etis bagi kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah melalui media sosial memuat pedoman agar informasi diverifikasi sebelum disebarkan (Majelis Ulama Indonesia, 2017). Dengan demikian, tindakan memverifikasi jawaban ChatGPT dapat dibaca bukan hanya sebagai sikap akademik, tetapi juga sebagai laku keagamaan.

Dalam artikel ini, *verifikasi* didefinisikan sebagai rangkaian tindakan menguji kebenaran dan kelayakan suatu jawaban sebelum dijadikan pegangan, sedangkan *negosiasi otoritas* didefinisikan sebagai proses menimbang dan mengatur ulang peran berbagai sumber, yaitu AI, teks, dan figur keilmuan, dalam menentukan apa yang dipercaya.

6. Posisi Artikel terhadap Kajian Terdahulu

Dari tinjauan di atas, tampak tiga kelompok kajian yang menjadi pijakan artikel ini. Kelompok pertama membahas otoritas keagamaan dalam tradisi Islam dan pesantren (Azra, 2004; Dhofier, 2011; van Bruinessen, 1995; Zaman, 2002). Kelompok ini menegaskan bahwa otoritas bersifat relasional dan terlabak, tetapi belum menjawab bagaimana relasi itu diuji oleh teknologi generatif. Kelompok kedua membahas otoritas dan dakwah di ruang digital (Bunt, 2018; Campbell, 2007, 2020; Hew, 2018; Lengauer, 2018). Kelompok ini menunjukkan bahwa otoritas dinegosiasikan, tetapi subjeknya selalu pelaku manusia. Kelompok ketiga membahas model bahasa dan pendidikan (Bender et al., 2021; Ji et al., 2023; Kasneci et al., 2023), yang

kuat pada aspek teknis dan pedagogis umum tetapi tidak menyentuh dimensi otoritas keagamaan.

Artikel ini berada di titik temu ketiganya. Ia meminjam gagasan keterlacakan dari kajian tradisi, gagasan negosiasi dari kajian agama digital, dan gambaran keterbatasan teknis dari kajian model bahasa, lalu mempertemukannya pada satu pengalaman konkret: verifikasi oleh mahasiswa PAI. Dengan demikian, artikel ini tidak mengklaim menemukan fenomena baru dalam arti empiris, melainkan menawarkan cara baca yang menghubungkan tiga kelompok kajian yang selama ini berjalan terpisah.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka dan analisis fenomenologis konseptual. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan yang dikaji menyangkut makna yang dialami subjek, bukan perilaku yang dapat dihitung. Fenomenologi dipilih karena fokus kajian adalah struktur pengalaman verifikasi, yaitu bagaimana proses itu dihayati dan dimaknai, bukan sekadar seberapa sering dilakukan (Creswell & Poth, 2018; Moustakas, 1994). Karena artikel ini belum bertumpu pada wawancara dengan partisipan, analisisnya bersifat konseptual: struktur pengalaman dirumuskan dengan membaca literatur dan menguji pola melalui skenario ilustratif.

Sumber data berupa buku akademik dan artikel jurnal bereputasi tentang otoritas keagamaan digital, dakwah dan media sosial di Indonesia, keterbatasan model bahasa, serta pemanfaatan AI dalam pendidikan. Selain itu, dokumen normatif berupa QS. Al-Hujurat ayat 6 dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 digunakan sebagai rujukan etis. Pemilihan sumber didasarkan pada tiga kriteria: relevansi dengan tema otoritas, verifikasi, dan model bahasa; kredibilitas penerbit atau jurnal; serta keterwakilan perspektif teoretis dan konteks Indonesia. Telaah dilakukan secara naratif, bukan melalui protokol tinjauan sistematis, sehingga keterwakilan literatur tidak diklaim menyeluruh.

Untuk memperjelas analisis, penulis menyusun tiga skenario ilustratif dengan nama samaran. Skenario dirancang berdasarkan pola yang dibahas dalam literatur dan pengamatan umum penulis sebagai mahasiswa program magister PAI, serta dipilih agar mewakili jenis pertanyaan yang berbeda, yaitu fikih ibadah, dalil muamalah, dan praktik pribadi. Dalam kerangka Moustakas (1994), skenario ini berfungsi sebagai variasi imajinatif, yaitu cara membayangkan beragam kemungkinan pengalaman untuk menemukan unsur yang tetap. Skenario tersebut bukan data empiris hasil wawancara dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

Analisis dilakukan melalui empat langkah yang diadaptasi dari prosedur Moustakas (1994) dan analisis tematik Braun dan Clarke (2006). Pertama, penulis menunda anggapan awal tentang AI, baik yang memuji maupun yang mencurigainya (*epoché*), agar pengalaman verifikasi dapat dibaca apa adanya. Kedua, literatur dan skenario dibaca berulang untuk mengidentifikasi pernyataan bermakna tentang keraguan, pengecekan, dan rujukan, yang kemudian direduksi menjadi kode. Ketiga, kode dikelompokkan menjadi tema melalui variasi imajinatif. Keempat, tema disintesis menjadi gambaran struktur esensial pengalaman dan model negosiasi otoritas.

Upaya menjaga keabsahan mengacu pada kriteria Lincoln dan Guba (1985). Kredibilitas diupayakan melalui triangulasi sumber, yakni mempertemukan teori otoritas, kajian agama digital, dan kajian model bahasa. Keterlacakan analisis dijaga dengan menautkan setiap tema pada literatur penopangnya (lihat Tabel 2). Konfirmabilitas dibatasi karena belum ada partisipan yang dapat mengonfirmasi temuan. Karena itu, hasil artikel ini harus dibaca sebagai proposisi analitis yang perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris.

Para penulis adalah mahasiswa program magister PAI yang berada dekat dengan fenomena yang dikaji. Kedekatan ini memberi kepekaan terhadap konteks, tetapi juga

membuka kemungkinan bias, misalnya kecenderungan membaca pengalaman verifikasi sebagai sesuatu yang selalu terjadi. Upaya menjaga jarak dilakukan melalui epoché pada tahap analisis dan dengan menahan diri untuk tidak menyajikan skenario ilustratif sebagai bukti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dari Guru ke Mesin Jawaban: Lanskap Otoritas Baru

Ada beberapa alasan yang masuk akal mengapa ChatGPT menjadi persinggahan pertama bagi mahasiswa. Ia tersedia setiap saat, memahami bahasa Indonesia sehari-hari, dan tidak menuntut penanya merasa sungkan. Bagi mahasiswa yang dibesarkan dalam budaya menghormati guru, bertanya kepada AI juga berarti tidak merepotkan atau tidak menunjukkan ketidaktahuan. Tuntutan tugas perkuliahan dengan tenggat yang ketat menambah daya tariknya. Alasan-alasan ini bersifat praktis, tetapi konsekuensinya bersifat epistemik: mahasiswa menerima jawaban tanpa melewati relasi yang biasanya menyertai belajar agama, yaitu koreksi, rujukan, dan kesaksian komunitas.

Untuk melihat posisi ChatGPT, Tabel 1 membandingkannya dengan dua bentuk otoritas yang lebih dikenal: guru atau ulama dan pendakwah media sosial.

Tabel 1. Perbandingan tiga bentuk sumber jawaban keagamaan

Dimensi	Guru Atau Ulama	Pendakwah Media Sosial	ChatGPT
Dasar legitimasi	Keilmuan, sanad, dan reputasi moral	Popularitas, kedekatan personal, dan kemasan visual	Kefasihan bahasa dan kemudahan akses
Keterlacakan rujukan	Tinggi: merujuk kitab dan guru	Bervariasi menurut figur	Rendah: rujukan sering tidak disebut atau tidak dapat dilacak
Akuntabilitas	Personal dan komunal	Personal dan dapat dikritik publik	Tidak ada penanggung jawab keagamaan
Kemungkinan dikoreksi	Dapat ditegur sesama ulama dan murid	Dapat dikritik di ruang publik	Tidak dapat ditegur; koreksi hanya melalui pengguna
Kecepatan akses	Terbatas oleh waktu dan pertemuan	Tinggi	Sangat tinggi, setiap saat
Kepekaan konteks penanya	Tinggi: mengenal penanya	Rendah sampai sedang	Terbatas pada informasi dalam pertanyaan

Sumber: Sintesis Penulis Berdasarkan Campbell (2007), Bunt (2018), Dhofier (2011), dan Bender Et Al. (2021).

Tabel 1 memperlihatkan ketimpangan yang menjadi pangkal persoalan. ChatGPT unggul pada kecepatan dan kemudahan akses, tetapi paling lemah pada keterlacakan rujukan dan akuntabilitas, dua hal yang justru menjadi inti legitimasi dalam tradisi keilmuan Islam. Dalam kerangka Weber (1978), ChatGPT tidak memenuhi satu pun tipe legitimasi: ia tidak berdiri di atas tradisi, tidak memiliki karisma personal, dan tidak beroperasi dalam aturan legal-rasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Daya tariknya lebih bertumpu pada kenyamanan. Hal ini menjelaskan mengapa mahasiswa sering merasa perlu "mengecek" meskipun jawabannya tampak meyakinkan: ada kebutuhan untuk menambatkan jawaban itu pada sumber yang legitimasinya sudah dikenal.

2. Tiga Momen dalam Pengalaman Verifikasi

Pengalaman verifikasi dapat dibaca melalui tiga momen yang tidak selalu berurutan. Setiap momen dijelaskan dengan satu skenario ilustratif dan dianalisis menggunakan kerangka fenomenologis.

Dalam Skenario 1, Rina, mahasiswa semester dua, bertanya kepada ChatGPT tentang hukum bermakmum kepada imam yang berbeda mazhab. Jawabannya menyebut "mayoritas ulama membolehkan" tanpa menyebut siapa, kitab apa, dan dengan syarat apa. Rina merasa ada yang kurang, bukan karena ia tahu jawabannya salah, melainkan karena ia terbiasa dengan pola kajian pesantren yang selalu menyebut rujukan.

Secara fenomenologis, yang tampak pada momen ini adalah terganggunya kepercayaan yang biasanya berjalan diam-diam (Schütz, 1967). Rina tidak memulai dengan sikap curiga; keraguan muncul ketika bentuk jawaban tidak sesuai dengan harapan tentang seperti apa jawaban keagamaan yang layak. Harapan itu dibentuk oleh kebiasaan belajar yang menempatkan rujukan sebagai bagian dari jawaban itu sendiri (Dhofier, 2011; van Bruinessen, 1995). Dengan kata lain, otoritas tradisional bekerja sebagai tolok ukur bahkan ketika sumbernya tidak hadir di ruangan. Fakta bahwa model bahasa menghasilkan teks dari pola statistik (Bender et al., 2021) menjelaskan mengapa rujukan itu absen, tetapi bagi Rina yang dialami adalah kekosongan, bukan penjelasan teknis.

Dalam Skenario 2, Ilham meminta ChatGPT mencantumkan dalil untuk sebuah hukum muamalah. Jawaban memuat ayat dan hadis, tetapi ketika dicek ke Al-Qur'an digital dan kitab hadis, salah satu nomor hadis tidak cocok. Pengalaman ini menggeser kepercayaannya: ChatGPT tidak lagi dipandang sebagai pemberi jawaban, melainkan sebagai pemberi petunjuk awal yang harus dikembalikan kepada teks.

Pola ini sejalan dengan temuan umum tentang halusinasi, yakni rujukan yang tampak sah namun tidak dapat diverifikasi (Ji et al., 2023). Yang menarik secara fenomenologis adalah makna tindakan mengecek itu sendiri. Bagi Ilham, mengecek dalil bukan ekspresi ketidakpercayaan pada teknologi, melainkan pengamalan prinsip tabayyun sebagaimana perintah QS. Al-Hujurat ayat 6. Verifikasi dengan demikian memiliki dimensi etis-religius: ia dihayati sebagai kewajiban moral, bukan hanya prosedur akademik. Kepercayaan tidak runtuh, tetapi dipulihkan melalui jangkar yang lebih kokoh, yaitu teks sumber. Pedoman MUI (2017) tentang verifikasi informasi memperkuat kerangka etis ini pada tataran kelembagaan.

Dalam Skenario 3, pada pertanyaan yang menyangkut praktik pribadi, misalnya hukum meng-*qadha* salat yang ditinggalkan bertahun-tahun, Sari membawa jawaban ChatGPT kepada dosen pembimbing atau ustazah yang ia kenal. Ia tidak meminta mereka mengabaikan jawaban AI, tetapi meminta penilaian atasnya. AI berperan sebagai bahan diskusi, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada figur yang dikenal dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pada momen ini tampak bahwa otoritas tidak hilang, melainkan berpindah fungsi: dari penentu jawaban menjadi pengesah keputusan, sebagaimana dikemukakan Campbell (2007) tentang otoritas yang dinegosiasikan, bukan ditiadakan. Zaman (2002) menggambarkan ulama sebagai pihak yang menjaga tradisi sambil beradaptasi; di sini adaptasi itu terjadi pada tingkat yang sangat konkret, yaitu ketika guru diminta menimbang jawaban mesin. Keputusan tentang praktik pribadi menyangkut konsekuensi bagi diri dan ibadah, sehingga Sari membutuhkan pihak yang dapat bertanggung jawab. Hal yang tidak dapat disediakan oleh ChatGPT.

3. Hubungan Antarmomen

Ketiga momen ini tidak harus berurutan. Seseorang dapat langsung ke momen ketiga untuk pertanyaan berisiko tinggi tanpa melalui pengecekan teks, atau berhenti pada momen pertama karena merasa jawabannya sudah cukup. Namun, ketiganya memiliki benang merah: verifikasi selalu bergerak dari jawaban yang tak bertuan menuju sumber yang bertuan, baik

berupa teks maupun orang. Verifikasi, dalam arti ini, adalah upaya memberi alamat kepada jawaban.

Dari ketiga momen tersebut dan literatur penopangnya, analisis menghasilkan empat tema esensial yang diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Tema esensial pengalaman verifikasi jawaban ChatGPT

Tema	Makna Esensial	Momen Terkait	Penopang Literatur
Kefasihan yang menuntut jejak	Jawaban yang lancar tetap terasa kurang bila tidak menyebut rujukan	Momen 1	Bender et al., (2021); Dhofier (2011)
Teks sebagai jangkar	Kepercayaan dipulihkan dengan mengembalikan jawaban kepada Al-Qur'an, hadis, dan kitab	Momen 2	Ji et al., (2023); MUI (2017)
Tanggung jawab yang tidak dapat didelegasikan	Keputusan praktik pribadi diserahkan kepada figur yang dapat dimintai pertanggungjawaban	Momen 3	Campbell (2007); Zaman (2002)
Kemudahan versus beban verifikasi	Jawaban instan menggoda orang berhenti pada rasa cukup	Lintas momen	Kasneci et al., (2023); Schütz (1967)

Sumber: Hasil Analisis Penulis.

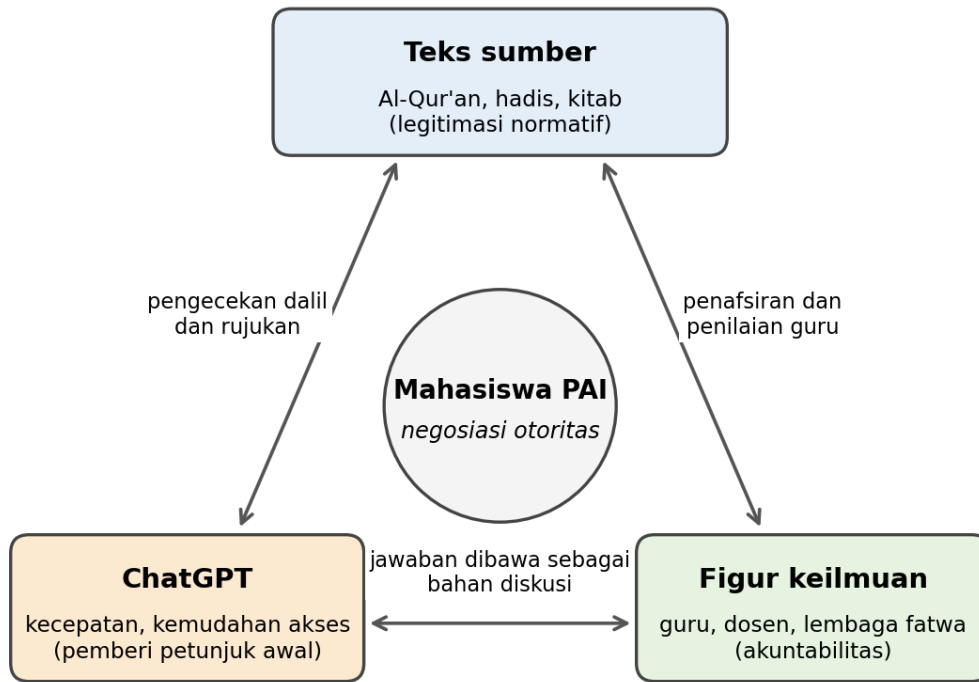
Tema pertama, kefasihan yang menuntut jejak. Pengalaman verifikasi berawal dari kesenjangan antara bentuk jawaban dan harapan mahasiswa. Kefasihan tidak cukup; dalam tradisi belajar agama, jawaban yang baik adalah jawaban yang menyebut asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa standar epistemik mahasiswa PAI tidak sepenuhnya dibentuk oleh teknologi, tetapi oleh tradisi keilmuan yang mendahuluinya.

Tema kedua, teks sebagai jangkar. Ketika keraguan muncul, mahasiswa kembali ke teks sumber. ChatGPT, secara tidak langsung, mendorong mereka membuka kembali Al-Qur'an, kitab hadis, dan kitab fikih yang barangkali jarang mereka buka. Temuan ini bersifat paradoks: teknologi yang dikhawatirkan menggeser sumber klasik justru dapat menjadi pemicu untuk kembali kepadanya, dengan syarat mahasiswa memiliki kemampuan dan kebiasaan melakukannya.

Tema ketiga, tanggung jawab yang tidak dapat didelegasikan. Untuk keputusan yang menyangkut diri sendiri, mahasiswa mencari pihak yang dapat bertanggung jawab. Mesin dapat memberi informasi, tetapi pertanggungjawaban hanya dapat dipikul oleh manusia atau lembaga. Inilah yang membuat figur keilmuan tetap tak tergantikan meskipun AI semakin mampu.

Tema keempat, kemudahan versus beban verifikasi. Tema ini bekerja diam-diam dan menjadi sumber risiko. Verifikasi menuntut waktu, kemampuan membaca sumber, dan keberanian menguji jawaban. Rasa sungkan terhadap guru dan rasa cukup terhadap jawaban yang sudah rapi dapat menghentikan proses sebelum sampai ke teks atau figur. Kasneci et al., (2023) mengingatkan bahwa manfaat model bahasa dalam pendidikan hanya terwujud bila disertai kemampuan berpikir kritis dan pengawasan pendidik. Tema ini menunjukkan bahwa kemampuan tersebut tidak otomatis dimiliki.

Dari tema-tema di atas, negosiasi otoritas tampak bergerak pada tiga poros: AI sebagai sumber cepat, teks (Al-Qur'an, hadis, kitab) sebagai sumber normatif, dan figur keilmuan sebagai penjamin tanggung jawab. Mahasiswa tidak memilih salah satunya secara mutlak, melainkan mengatur ulang peran masing-masing menurut jenis pertanyaan dan tingkat risiko. Gambar 1 memodelkan hubungan ini.



Gambar 1. Model Negosiasi Otoritas Keagamaan Mahasiswa PAI (Hasil Analisis Penulis)

Pada Gambar 1, mahasiswa berada di tengah dan tidak berpindah secara sepihak ke salah satu sudut. ChatGPT terhubung dengan teks sumber melalui tindakan pengecekan dalil dan rujukan, teks sumber terhubung dengan figur keilmuan melalui penafsiran dan penilaian guru, dan ChatGPT terhubung dengan figur keilmuan ketika jawaban dibawa sebagai bahan diskusi. Model ini menegaskan bahwa AI tidak berdiri sendiri sebagai otoritas, tetapi selalu dibaca melalui dua poros lain. Tabel 3 merinci bagaimana pembagian peran itu berubah menurut jenis pertanyaan.

Tabel 3. Strategi verifikasi dan Posisi Otoritas Menurut Jenis Pertanyaan

Jenis Pertanyaan	Tingkat Risiko	Peran ChatGPT	Strategi Verifikasi	Otoritas Penentu
Definisi dan konsep dasar (mis. pengertian ijtihad)	Rendah	Penjelas awal	Membandingkan dengan buku ajar atau kamus istilah	Teks akademik
Dalil dan rujukan (ayat, hadis)	Menengah	Penunjuk arah	Mengecek langsung ke mushaf dan kitab hadis	Teks sumber
Perbedaan pendapat mazhab	Menengah	Peringkasan	Menelusuri kitab fikih dan penjelasan ulama	Teks dan guru
Hukum untuk praktik pribadi (ibadah, muamalah)	Tinggi	Bahan diskusi	Konsultasi langsung	Figur keilmuan
Isu kontemporer (fintech, bioetika)	Tinggi	Pemetaan isu	Merujuk fatwa lembaga seperti MUI dan kajian pakar	Lembaga fatwa

Sumber: Hasil Analisis Penulis.

Tabel 3 memperlihatkan gradasi: semakin dekat pertanyaan dengan keputusan hidup dan ibadah, semakin besar bobot figur atau lembaga manusia. Sebaliknya, untuk pertanyaan konseptual, ChatGPT lebih mudah diterima sebagai pintu masuk. Ini bukan penolakan terhadap AI, melainkan semacam pembagian kerja epistemik yang dibentuk oleh rasa tanggung jawab keagamaan. Menarik dicatat bahwa tingkat risiko di sini tidak ditentukan oleh sulitnya pertanyaan, tetapi oleh konsekuensinya bagi praktik. Pertanyaan yang secara akademik rumit, seperti definisi ijtihad, dapat diterima dengan pengecekan ringan, sedangkan pertanyaan yang tampak sederhana, seperti tata cara mengganti salat, menuntut figur penjamin karena menyangkut pertanggungjawaban pribadi.

4. Faktor yang Membedakan Cara Negosiasi

Negosiasi otoritas tidak berlangsung sama pada semua mahasiswa. Setidaknya ada lima faktor yang dapat membedakannya, yang dirumuskan di sini sebagai proposisi untuk diuji pada penelitian lanjutan.

- Literasi sumber primer: Mahasiswa yang mampu membaca teks Arab dan menggunakan kitab rujukan memiliki alat untuk mengecek jawaban. Mahasiswa yang tidak memilikinya cenderung berhenti pada kesan terdengar benar, karena biaya verifikasi baginya terlalu tinggi.
- Latar Pendidikan: Mahasiswa dengan latar pesantren yang terbiasa dengan kajian kitab dan penyebutan sanad cenderung lebih cepat merasakan kekosongan rujukan pada jawaban AI, sebagaimana pada Skenario 1 (Dhofier, 2011; van Bruinessen, 1995). Mahasiswa dari latar pendidikan umum mungkin lebih mudah menerima jawaban yang tampak lengkap. Kedua profil ini sengaja dibayangkan sebagai kontras ilustratif dan bukan generalisasi tentang kelompok tertentu.
- Tekanan waktu dan akademik: Tenggat tugas dan beban kuliah memperbesar godaan untuk menerima jawaban pertama. Dalam kondisi ini, tema keempat (kemudahan versus beban verifikasi) menguat
- Budaya hormat kepada guru: Budaya ta'zim dapat menjadi modal sekaligus hambatan. Ia menjadi modal ketika mahasiswa menyadari bahwa penilaian akhir ada pada guru, tetapi menjadi hambatan ketika mahasiswa merasa tidak pantas menguji jawaban atau sungkan membawa jawaban AI kepada dosen, sehingga memilih diam.
- Afiliasi keagamaan dan ekosistem fatwa local. Di Indonesia, banyak mahasiswa berada dalam lingkungan yang akrab dengan lembaga rujukan seperti majelis fatwa dan forum kajian hukum milik organisasi kemasyarakatan Islam. Jawaban ChatGPT yang bersifat umum belum tentu selaras dengan pandangan yang dianut lingkungan tersebut. Mahasiswa yang menyadari keberadaan rujukan lokal ini cenderung membawa jawaban AI untuk dicocokkan dengan pandangan lembaga yang dikenalnya, sehingga ekosistem otoritas lokal berfungsi sebagai penyeimbang alami terhadap jawaban yang tak bertuan.

5. Dialog dengan Teori: AI sebagai Lapisan Pra-Otoritas

Temuan analitis di atas memberi bahan untuk meninjau kembali beberapa gagasan teoretis. Pertama, terhadap tipologi Weber (1978), ChatGPT tidak menemukan tempat yang jelas. Karena itu, penulis mengusulkan untuk membacanya sebagai otoritas semu, yaitu sumber yang tampak otoritatif karena kefasihan dan kemudahan aksesnya, tetapi tidak memiliki pengakuan keilmuan dan akuntabilitas yang menopang otoritas sejati. Istilah ini dipakai sebagai konsep sensitisasi, bukan klaim bahwa AI sama sekali tidak berpengaruh.

Kedua, temuan ini sejalan dengan pandangan Campbell (2007) bahwa komunitas beragama menegosiasikan teknologi dalam kerangka struktur otoritas yang sudah ada. Mahasiswa PAI tidak menyerahkan penafsiran kepada AI, tetapi menempatkannya sebagai alat

bantu yang diuji. Namun, kasus AI menambah satu kekhasan: berbeda dengan pendakwah digital yang dapat dinilai dari rekam jejaknya, AI hanya dapat dinilai dari isi jawabannya, sehingga beban penilaian sepenuhnya berpindah kepada pengguna.

Ketiga, dengan kacamata mediatisasi (Hjarvard, 2008), AI adalah lingkungan media baru tempat logika kecepatan dan kemudahan membentuk kebiasaan bertanya. Di dalam lingkungan ini, praktik verifikasi muncul sebagai cara mempertahankan logika keilmuan agama di tengah logika media.

Berdasarkan ketiganya, artikel ini mengajukan gagasan *lapisan pra-otoritas*: posisi AI dalam kehidupan keagamaan mahasiswa lebih tepat dipahami sebagai tahap awal sebelum otoritas yang sebenarnya dirujuk, bukan sebagai otoritas itu sendiri. Lapisan ini berguna sebagai pintu masuk dan pemantik pertanyaan, tetapi mengandung risiko apabila dianggap sebagai tujuan akhir. Gagasan ini perlu diuji melalui penelitian empiris sebelum dapat dijadikan klaim yang lebih kuat.

6. Implikasi bagi Pembelajaran PAI

Pola yang ditemukan dapat dirumuskan menjadi protokol verifikasi lima langkah yang dapat dipraktikkan mahasiswa:

- Tandai klaim. Pisahkan bagian jawaban yang berupa klaim hukum, dalil, atau pendapat ulama dari bagian yang hanya penjelasan umum.
- Telusuri rujukan. Cari tahu apakah setiap klaim disertai rujukan yang dapat dilacak. Jawaban tanpa rujukan diperlakukan sebagai hipotesis.
- Cocokkan dengan teks sumber. Periksa ayat, hadis, dan kutipan kitab langsung pada sumbernya, termasuk nomor dan redaksinya.
- Bandingkan pendapat. Telusuri apakah ada perbedaan pendapat mazhab atau fatwa lembaga yang tidak disebut dalam jawaban.
- Bawa ke figur keilmuan. Untuk keputusan praktik pribadi, minta penilaian guru, dosen, atau lembaga fatwa sebelum dijadikan pegangan.

Pada tingkat perkuliahan, literasi AI keagamaan dapat dilatihkan secara terstruktur. Tabel 4 menawarkan rancangan lima tahap yang dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah seperti metodologi studi Islam, ilmu hadis, atau fikih kontemporer.

Tabel 4. Rancangan Latihan Literasi AI Keagamaan dalam Perkuliahan PAI

Tahap	Aktivitas	Kompetensi yang dilatih
Pemetaan	Mahasiswa mengajukan pertanyaan keagamaan kepada ChatGPT dan menandai klaim yang dapat diuji	Mengidentifikasi klaim
Penelusuran	Setiap klaim ditelusuri ke Al-Qur'an, hadis, dan kitab rujukan	Literasi sumber primer
Pembandingan	Jawaban dibandingkan dengan pendapat mazhab dan fatwa lembaga	Kepekaan terhadap perbedaan pendapat
Refleksi	Kelas mendiskusikan bagian jawaban yang benar, keliru, dan menyesatkan	Berpikir kritis dan etika bertanya
Konsultasi	Dosen atau ustaz memberi penilaian akhir untuk isu praktik	Pemahaman peran otoritas

Sumber: Rancangan Penulis Berdasarkan Temuan Analisis.

Dengan rancangan ini, verifikasi menjadi praktik bersama dan bukan beban individu. Dosen dapat memanfaatkan jawaban AI sebagai bahan kritik kolektif di kelas, sehingga rasa sungkan berkurang dan mahasiswa melihat bahwa menguji jawaban merupakan bagian dari belajar, bukan tanda tidak menghormati. Latihan ini juga relevan bagi calon guru: mahasiswa PAI yang terlatih memverifikasi akan lebih siap membimbing peserta didik yang kelak membawa jawaban AI ke ruang kelas.

Rancangan ini juga menyentuh persoalan integritas akademik. Alih-alih melarang penggunaan AI, dosen dapat menilai proses verifikasi: mahasiswa diminta melampirkan jawaban awal ChatGPT, catatan pengecekan terhadap teks sumber, dan alasan menerima atau menolak tiap klaim. Dengan cara ini, penilaian bergeser dari hasil akhir ke kualitas penalaran dan kejujuran dalam menunjukkan sumber. Bagi calon guru, kebiasaan menyebutkan asal setiap klaim sekaligus melatih etos keilmuan yang sejalan dengan tradisi sanad: pengetahuan disampaikan bersama jejaknya, bukan sebagai pernyataan yang berdiri sendiri.

Meskipun demikian, rancangan ini bersifat usulan. Efektivitasnya belum diuji, dan penerapannya perlu menyesuaikan karakter mata kuliah, kemampuan bahasa Arab mahasiswa, serta ketersediaan kitab rujukan di perpustakaan kampus. Dosen perlu memulai dari pertanyaan berisiko rendah sebelum beranjak ke isu yang lebih sensitif, agar mahasiswa memperoleh pengalaman keberhasilan memverifikasi sebelum menghadapi persoalan yang lebih pelik.

Pada tingkat kelembagaan, perguruan tinggi keagamaan perlu merumuskan pedoman penggunaan AI untuk urusan keagamaan yang menegaskan bahwa jawaban AI diperlakukan sebagai bahan awal, bukan fatwa. Lembaga juga perlu menegaskan kembali fungsi sanad dan bimbingan guru, bukan sebagai penghalang teknologi, melainkan sebagai jaminan tanggung jawab yang tidak dapat diberikan oleh mesin. Mengingat kelemahan yang sama dapat dialami banyak pengguna sekaligus (Bommasani et al., 2021), pedoman bersama lebih efektif daripada kehati-hatian yang diserahkan pada masing-masing individu.

7. Risiko, Etika, dan Batas Verifikasi

Protokol verifikasi tidak menghapus seluruh risiko. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dicermati. Pertama, verifikasi hanya dapat dilakukan atas apa yang tampak. Jawaban yang keliru tetapi tidak menimbulkan kejanggalan, misalnya penyederhanaan perbedaan pendapat menjadi satu pendapat tunggal, sulit terdeteksi oleh mahasiswa yang belum mengenal khazanah perbedaan itu. Semakin dangkal pengetahuan awal seseorang, semakin kecil kemungkinan ia mengenali kekeliruan, sehingga kemampuan memverifikasi bergantung pada pengetahuan yang justru sedang ia cari.

Kedua, verifikasi memiliki dimensi privasi dan kehati-hatian dalam bertanya. Pertanyaan keagamaan yang menyangkut praktik pribadi sering memuat informasi sensitif tentang keadaan seseorang. Mahasiswa perlu menyadari bahwa menuliskan detail pribadi ke dalam layanan AI berbeda dengan menyampaikannya secara tertutup kepada guru yang dikenal. Pertimbangan ini memperkuat alasan mengapa pertanyaan berisiko tinggi sebaiknya dibawa kepada figur keilmuan, bukan hanya karena soal akurasi, tetapi juga karena soal adab dan kerahasiaan.

Ketiga, ada risiko penyeragaman. Bila banyak mahasiswa menggunakan sistem yang sama dan menerima jawaban dengan pola yang sama, ragam pendapat dalam khazanah fikih dapat tereduksi menjadi satu suara yang tampak netral (Bommasani et al., 2021). Dalam tradisi yang menghargai perbedaan pendapat sebagai kekayaan ilmu, penyeragaman semacam ini merupakan kerugian epistemik tersendiri. Karena itu, latihan pembandingan pendapat pada Tabel 4 tidak sekadar teknis, tetapi juga menjaga keragaman tradisi.

Dengan mempertimbangkan ketiga risiko ini, verifikasi sebaiknya dipahami sebagai praktik berlapis dan berkelanjutan, bukan sebagai satu tindakan yang menuntaskan persoalan. Ia memerlukan pengetahuan dasar yang memadai, kebiasaan bertanya secara beradab, dan komunitas belajar yang saling mengoreksi.

Agar hubungan antara pertanyaan penelitian dan temuan lebih jelas, Tabel 5 merangkum pokok-pokok hasil analisis.

Tabel 5. Ringkasan Temuan Berdasarkan Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian	Temuan analitis	Bagian pembahasan
Bagaimana pengalaman verifikasi dimaknai?	Tiga momen (keraguan, pencarian jangkar, rujukan kepada figur) dan empat tema esensial	4.2 dan 4.3
Bagaimana otoritas dinegosiasikan?	Tiga poros (ChatGPT, teks, figur keilmuan) dengan bobot yang berubah menurut tingkat risiko; AI sebagai lapisan pra-otoritas	4.4 sampai 4.6
Apa implikasinya bagi pembelajaran PAI?	Protokol verifikasi lima langkah, rancangan latihan lima tahap, dan pedoman kelembagaan	4.7 dan 4.8

Sumber: Hasil Analisis Penulis.

Ringkasan ini menunjukkan bahwa ketiga pertanyaan saling bertaut: pemahaman tentang bagaimana verifikasi dialami menjadi dasar untuk memahami cara otoritas dinegosiasikan, dan keduanya menjadi dasar bagi rancangan pembelajaran yang tepat sasaran.

E. KESIMPULAN

Artikel ini berargumen bahwa verifikasi jawaban ChatGPT oleh mahasiswa PAI merupakan bentuk negosiasi otoritas keagamaan, bukan sekadar pengecekan fakta. Menjawab pertanyaan pertama, pengalaman verifikasi dapat dibaca melalui tiga momen: keraguan karena ketidaklengkapan, pencarian jangkar pada teks, dan rujukan kepada figur manusia. Dari ketiganya terumuskan empat tema esensial, yaitu kefasihan yang menuntut jejak, teks sebagai jangkar, tanggung jawab yang tidak dapat didelegasikan, serta ketegangan antara kemudahan dan beban verifikasi.

Negosiasi otoritas bergerak pada tiga poros, yaitu ChatGPT, teks sumber, dan figur keilmuan. AI ditempatkan sebagai pemberi petunjuk awal, sedangkan otoritas penentu tetap bertumpu pada teks dan guru, terutama untuk persoalan yang menyangkut praktik pribadi. Secara teoretis, posisi AI lebih tepat dipahami sebagai lapisan pra-otoritas. Prinsip tabayyun memberi landasan nilai bagi sikap ini. Pembelajaran PAI perlu membekali mahasiswa dengan keterampilan verifikasi yang konkret melalui protokol lima langkah dan rancangan latihan terstruktur, serta menjaga peran bimbingan keilmuan. Negosiasi tersebut tidak merata: mahasiswa dengan literasi sumber primer yang lemah rentan menerima jawaban yang fasih namun keliru.

Keterbatasan artikel ini terletak pada sifatnya yang konseptual dan pada skenario ilustratif yang belum berasal dari data lapangan, sehingga seluruh temuan perlu dibaca sebagai proposisi analitis. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan wawancara fenomenologis mendalam terhadap mahasiswa PAI di beberapa perguruan tinggi untuk menguji tema dan model yang diajukan. Penelitian lain dapat mengaudit akurasi jawaban ChatGPT atas pertanyaan fikih dan hadis secara sistematis, atau menguji efektivitas rancangan pembelajaran pada Tabel 4 melalui desain kuasi-eksperimen.

Sebagai saran praktis, mahasiswa PAI dianjurkan memperlakukan jawaban AI sebagai bahan awal yang harus diuji dan tidak menjadikannya dasar amal sebelum dikonfirmasi pada teks dan figur keilmuan. Dosen dan program studi disarankan memasukkan latihan verifikasi ke dalam perkuliahan serta membuka ruang diskusi yang aman bagi mahasiswa untuk membawa jawaban AI tanpa rasa sungkan. Pengelola perguruan tinggi disarankan menyusun pedoman penggunaan AI untuk urusan keagamaan yang selaras dengan prinsip tabayyun dan menghargai peran sanad.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2004). *The origins of Islamic reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'ulama' in the seventeenth and eighteenth centuries*. Allen & Unwin; University of Hawai'i Press.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623.
- Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., ... Liang, P. (2021). On the opportunities and risks of foundation models. *arXiv:2108.07258*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority*. University of North Carolina Press.
- Campbell, H. A. (2007). Who's got the power? Religious authority and the Internet. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 12(3), 1043–1062.
- Campbell, H. A. (2020). *Digital creatives and the rethinking of religious authority*. Routledge.
- Campbell, H. A., & Tsuria, R. (Eds.). (2021). *Digital religion: Understanding religious practice in digital media* (2nd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia* (Edisi revisi). LP3ES.
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., ... Wright, R. (2023). "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642.
- Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (Eds.). (2003). *New media in the Muslim world: The emerging public sphere* (2nd ed.). Indiana University Press.
- Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020). GPT-3: Its nature, scope, limits, and consequences. *Minds and Machines*, 30(4), 681–694.
- Hew, W. W. (2018). The art of dakwah: Social media, visual persuasion and the Islamist propagation of Felix Siau. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 61–79.
- Hjarvard, S. (2008). The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change. *Northern Lights*, 6(1), 9–26.
- Husserl, E. (1970). *The crisis of European sciences and transcendental phenomenology* (D. Carr, Trans.). Northwestern University Press.
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1–38.
- Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274.
- Lengauer, D. (2018). Sharing semangat taqwa: Social media and digital Islamic activism in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 5–23.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial*. Majelis Ulama Indonesia.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. SAGE Publications.

- Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C., Mishkin, P., ... Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 27730–27744.
- Schütz, A. (1967). *The phenomenology of the social world*. Northwestern University Press.
- Van Bruinessen, M. (1995). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.
- Van Manen, M. (2016). *Phenomenology of practice: Meaning-giving methods in phenomenological research and writing*. Routledge.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Zaman, M. Q. (2002). *The ulama in contemporary Islam: Custodians of change*. Princeton University Press.